



RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM TAHUN 2024



Jl. Raja Haji No.09 -10 Sekupang – Batam Telp. 0778 321370
Email : dspmkotabatam@gmail.com, Website : dinsospm.batam.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil' alamiin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2024 telah tersusun. Rencana Kerja ini memuat tentang gambaran umum Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Visi dan Misi serta Kondisi Pembangunan Bidang Urusan Sosial serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024, baik perkiraan permasalahan yang dihadapi maupun rencana upaya penanganannya.

Rencana Kerja ini sangat diperlukan karena disamping memuat informasi prioritas pembangunan juga program maupun kegiatannya. Hal ini sebagai pedoman dalam memberi arah penanganan pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam rangka menanggulangi permasalahan sosial, Pemberdayaan Masyarakat serta upaya meningkatkan, mengembangkan, memperbaiki dan memperbaharui hasil-hasil pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial, disesuaikan dengan Rancangan Kinerja dan forum OPD tahun 2024, apakah ada usulan-usulan di dalam Forum OPD yang perlu di masukan kedalam Renja OPD.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini belum sempurna, sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan yang akan datang sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Renja ini. Semoga Renja ini dapat bermanfaat khususnya bagi pelaksana kebijakan di bidang Kesejahteraan Sosial maupun masyarakat pada umumnya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan anugerah-Nya bagi kita semua. Aamiin...

Batam, Juli 2023

Plt. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Batam

Drs. Leo Putra, A.P., M.Si

Nip. 19750806 199501 1 001



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Tahun 2022 Dan Capaian Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam	9
2.2. Analsis Kinerja Pelayana Dinas Sosial	20
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	27
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2024	30
3.3. Program Dan Kegiatan Renja Dinas Sosial	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
BAB V PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel II.1-1 (Tabel T-C.29)	11
Tabel II.2-1 (Tabel T-C.30)	21
Tabel III.1 - 1	28
Tabel III.2 - 1	31
Tabel III.3-1 (Tabel T-C.33)	37
Tabel IV - 1	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pasal 13 ayat (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan dalam rangka Menyusun program dan kegiatan sesuai Renstra yang telah disusun dan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategi (Renstra) RKPD sebelum musrenbang tingkat kota. Berdasarkan dari keinginan mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Mengingat peran dan fungsi Renja Dinas

Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam, maka proses penyusunannya dilakukan sistematis dan partisipatif oleh seluruh aparatur Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dan masyarakat untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang tepat dan berkesinambungan.

Pada hakekatnya pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan dari Pembangunan Nasional kita. Bidang yang sangat penting, karena kesejahteraan sosial pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang fokus sarannya diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta penataan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis dalam rangka meningkatkan taraf hidup sosial masyarakat demi tercapainya rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir bathin.

Upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga Negara demi tercapainya kesejahteraan Sosial, Negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dengan ditetapkannya Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 yang merupakan salah satu acuan dalam pembangunan daerah Kota Batam sebelum forum musyawarah perencanaan pembangunan salah satunya adalah dari forum OPD.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang mengacu kepada hasil Forum OPD dan pembangunan Kota Batam yang akan tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang RI nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Palawan, Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sisingi dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan rencana

- Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2016, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
 24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021, Tentang Perubahan atas peraturan daerah kota Batam no 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah
 25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2021-2026
 26. Peraturan Walikota Batam Nomor 68 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Walikota Batam nomor 78 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;.

27. Peraturan Walikota Batam nomor 71 tahun 2022, Tentang perubahan atas peraturan Walikota Batam nomor 36 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam;
28. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026.
29. Peraturan Walikota Nomor 210 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Kota Batam Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan teknis tahunan yang memuat kebijakan, program-program, sasaran-sasaran yang akan dicapai serta indikasi kegiatan pembangunan dalam Tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman :

1. Menjabarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2021-2026;
2. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang;
3. Merumuskan rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2024;
4. Menjadi pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

- pada tahun berjalan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran, program dan indikator kinerja kegiatan;
5. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam;
 6. Menciptakan kesinambungan kegiatan pembangunan dari tahun ketahun dan keselarasan Program, Kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dengan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD maupun RPJMD;
 7. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui pengukuran kinerja Dinas Kesehatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan daerah;
 8. Menjadi dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam;
 9. Meningkatkan sistem surveilans dan sistem informasi Sosial dalam rangka mendukung perencanaan berbasis data dan informasi yang akurat;
 10. Menjadi acuan untuk menyusun evaluasi kinerja tahunan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.
 11. Meningkatkan mutu pelayanan Sosial.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Renja Tahun 2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM

Evaluasi Pelaksanaan Renja 2023 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2023 melalui analisis terhadap pelaksanaan renja SKPD Tahun 2023 dan capaian Renstra SKPD, Analisa kinerja pelayanan SKPD, isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Pencapaian tersebut akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas serta akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam menunjang sasaran output.

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam tahun 2022 serta dapat mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM

Jumlah pagu anggaran Tahun 2022 Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp.49.467.435.330,00 dengan realisasi belanja sebesar

Rp.37.968.461.187 atau sebesar 76.47%. Dari nilai realisasi tersebut terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp.11.978.974.143 atau 23.53%.

Dalam penganggaran tahun 2022 ini nama program dan kegiatan sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan indikator kinerja disusun mengikuti program dan Kegiatan yang baru. Dinas Sosial melaksanakan 8 Program 13 kegiatan dan 33 sub kegiatan

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun dapat dilihat pada Tabel II.1-1 sebagai berikut:

Tabel II.1-1 (Tabel T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2022 KOTA BATAM

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ sub kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan	:	Sosial								
1.06	Bidang	:	Pemberdayaan Sosial								
1.06.02	Program	:	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	100%	100%	100%		100%	100%	100%
1.06.02.2.03	Kegiatan	:	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1.06.02.2.03.01	Sub Kegiatan	:	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	102 Pendamping	100%	100%	100%	100%
1.06.02.2.03.03		:	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	12 TKSK	100%	100%	100%	100%
1.06.02.2.03.05		:	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	10 Pengurus	100%	100%	100%	100%
1.06	Bidang	:	Rehabilitasi Sosial									
1.06.04	Program	:	Rehabilitasi Sosial	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi;	1. 100% 2. 69,49%	1.63,64 % 2.16,57 %				1.72,73 % 2.34,29 %		
1.06.04.2.01	Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas (fisik dan mental) terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase anak terlantar yang direhabilitasi; 3. Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi;	1. 10.9% (84/767); 2. 75% (150/200); 3. 85.7% (300/350); 4. 92.6% (100/108)	1. 8,5% (65/767); 2. 50% (100/200); 3. 71,4% (250/350); 4. 56,5% (61/108)				1. 9.6% (74/767); 2. 60% (120/200); 3. 71,4% (250/350); 4. 56,5% (61/108);		

				4. Persentase tuna sosial yang direhabilitasi;								
1.06.04.2.01.04	sub kegiatan	:	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	30 Orang	12 Orang	36 %	100%	100%
1.06.04.2.01.05		:	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	550 Orang	500 Orang	95 %	100%	100%
1.06.04.2.01.06		:	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	225 Orang	225 Orang	100 %	100%	100%
1.06.04.2.01.10		:	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	20 Orang	14 Orang	100 %	100%	100%
1.06.04.2.01.12		:	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	60 Orang	73 Orang	100 %	100%	100%
1 06	Bidang	:	Pengelolaan Data Fakir Miskin									
1.06.05	Program	:	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT, BST)	79.85%	77.76%				78.68%	78.68%	

1.06.05.2.02	Kegiatan	:	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang divalidasi dan Jumlah mahasiswa yang di bantu	100%	95.58%				100%	100%	
1.06.05.2.02.02	sub kegiatan	:	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	60108 RTS	60108 RTS	100%	100%	100%
1.06.05.2.02.03		:	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	100 %	6 mahasiswa	28.990 orang	100%	100%	100%
1.06	Bidang	:	Perlindungan, Jaminan, dan Pemberdayaan Sosial									
1.06.06	Program	:	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%				100%	100%	
1.06.06.2.01	Kegiatan	:	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana dari kelompok rentan yang dilindungi dan diberikan penjaminan sosial	100%	100%				100%	100%	
1.06.06.2.01.01	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	500 orang	1003 orang	100%	100%	100%
1.06	Bidang	:	Perlindungan, Jaminan, dan Pemberdayaan Sosial									

1.06.07	Program	:	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana	100%	86.66%	89.66%			89.66%	89.66%	
1.06.07.2.01	Kegiatan	:	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana TMP yang direhab dan dipelihara	93.10%	90%	90%	21 Makam	45 Makam	90%	90%	
1.06.07.2.01.01	Sub Kegiatan	:	Rehabilitasi Sarana Dan Prasaran Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								
1.06.07.2.01.02			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Makam Yang Terpenuhi Pemeliharaannya Pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100%	45 Makam	45 Makam	100%	100%	100%
1.06.07.2.01.03			Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100%	2 Orang	2 Orang	100%	100%	100%
2	Urusan	:	Pemberdayaan Masyarakat									
2.13	Bidang	:	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya								
2.13.04	Program	:	Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berprestasi	100%	56.25%				75%	75%	
2.13.04.2.01.18	Kegiatan	:	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Kelurahan	3 Kelurahan	100 %	3 kelurahan	3 Kelurahan	3 Kelurahan	3 Kelurahan	3 Kelurahan
2	Urusan	:	Pemberdayaan Masyarakat									

2.13	Bidang	:	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya								
2.13.05	Program	:	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelurahan yang berprestasi	100%	93.55%			94.44%	94.44%		
2.13.05.2.01	Kegiatan	:	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	100%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.13.05.2.01.03	Sub Kegiatan	:	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	97%	480 Lembaga	480 Lembaga	100%	100%	100%	100%
2.13.05.2.01.06		:	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100 %	100%	3 laporan	3 Laporan	100%	100%	100%	100%

1	Urusan	:	Non Urusan									
1.06	Bidang	:	Sekretariat									
1.06.01	Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%			100%	100%	
1.06.01.2.01	Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen
1.06.01.2.01.01	Sub Kegiatan	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen
1.06.01.2.02	Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%				100%	100%
1.06.01.2.02.01	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	40 Orang	40 Orang	100%	100%	100%
1.06.01.2.02.03		:	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	100%	100%
1.06.01.2.06	Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%				100%	100%
1.06.01.2.06.01	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%	100%	100%
1.06.01.2.06.02		:	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%	100%	100%
1.06.01.2.06.04		:	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100%	100%	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%	100%	100%

1.06.01.2.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	100%	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%	100%	100%
1.06.01.2.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang Disediakan	100%	100%	100%	1 Jenis	1 Jenis	100%	100%	100%
1.06.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	7 Kali	7 Kali	100%	100%	100%
1.06.01.2.07	Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	4 Unit	4 Unit	100%	100%	100%
1.06.01.2.07.06	Sub Kegiatan		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	100%	100%	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%	100%	100%
1.06.01.2.08	Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%				100%	100%
1.06.01.2.08.02	Sub Kegiatan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100%	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%	100%	100%
1.06.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	20 Orang THL	20 Orang THL	100%	100%	100%

1.06.01.2.09	Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%			100%	100%	100%
1.06.01.2.09.01	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	100%	100%	2 Unit	2 Unit	100%	100%	100%
1.06.01.2.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	100%	100%	100%	4 Unit	4 Unit	100%	100%	100%
1.06.01.2.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	100%	100%	50 Unit	50 Unit	100%	100%	100%
1.06.01.2.09.10			Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	100%	100%	2 Unit	2 Unit	100%	100%	100%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

TABEL II.2-1 (Tabel T-C.30)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinsos						Realisasi Capaian Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	1.Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi;			63.64%	67.62%	72.73%	81.82%	90.91%	19%	100%	69%	
	2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi;			16.57%	22.86%	34.29%	81.82%	58.06%	69.49%			
3	Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT,BST)			95,58% (57.450) 1. 0 mahasiswa; 2. 0 fasilitator; 3. 0 petugas	100% (60.108) 1. 6 mahasiswa; 2. 0 fasilitator; 3. 0 petugas	100% (60.108) 1. 6 mahasiswa; 2. 50 fasilitator; 3. 18 petugas (6 puskessos)	100% (60.108) 1. 8 mahasiswa; 2. 50 fasilitator; 3. 18 petugas (6 puskessos)	100% (60.108) 1. 8 mahasiswa; 2. 50 fasilitator; 3. 24 petugas (8 puskessos)	100% (60.108) 1. 8 mahasiswa; 2. 50 fasilitator; 3. 30 petugas (10 puskessos)	95.53% (57.420)	100 % (60.108)	
4.	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana			0%	89,66%	89,66%	89,66%	93,10%	93,10%	0%	100%	

6	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya			37.50%	56.25%	75.00%	93.75%	93.75%	100.00%	23.44%	23.44%	
7	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif			93.55%	94.44%	97.55%	98.44%	99.22%	100.00%	93.55%	93.55%	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Permasalahan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. PMKS yang menjadi sasaran penyelenggaraan urusan sosial saat ini terdapat 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Beberapa persoalan pokok yang menjadi fokus atau perhatian bersama, yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya manusia. selain terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang dimiliki juga kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam melakukan kegiatan dan penanganan terhadap Penyandang masalah kesejahteraan sosial, diantaranya adalah PSKS dan pekerja-pekerja sosial. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dituntut untuk bisa meningkatkan kecakapan dan kompetensi sumber daya manusianya.
2. Terbatasnya anggaran yang dimiliki, Banyaknya program kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan pencapaian target 100% diperlukan dana yang tidak sedikit. dana yang bersumber dari dana APBD Kota Batam maupun Provinsi Kepulauan Riau, APBN masih terbatas untuk melakukan Penanganan masalah Kesejahteraan Sosial secara menyeluruh.
3. Kesulitan Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang bermobilitas sangat tinggi seperti Tuna Sosial sehingga data selalu berubah. Disisi lain

partisipasi bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan juga masih kurang dalam Pembangunan Bidang Sosial.



Gambar I
Diagram Permasalahan dan Isu Strategis, Kondisi Saat Ini dan Dampaknya

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sebagai lembaga yang memberikan pelayanan dan Penanganan terhadap PMKS masih perlu terus dilakukan penguatan secara kelembagaan agar pencapaian kinerja di masa datang dapat tercapai dengan baik. Tiga isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

sesuai dengan peran dan kewenangan agar lebih optimal sehingga perlu diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang, ketiga isu tersebut yaitu :

1. Masalah Optimalnya Pelayanan dan Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Masih belum Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan terhadap Masyarakat;
3. Masih belum Optimalnya Pelayanan Penunjang;

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam terus melakukan perbaikan, dan pengembangan secara kelembagaan baik SDM, Organisasi dan tatalaksana yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Dinsospm Kota Batam dapat mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos kerja yang baik, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan Bidang Sosial nasional secara umum dan Kesejahteraan masyarakat Kota Batam khususnya.

Beberapa factor penyebab belum optimalnya pencapaian fungsi tersebut diatas sehingga menjadi isu strategis antara lain karena :

- a. Masih terbatasnya dan minimnya sumber daya manusia Sosial yang bersifat pegawai tetap yang ada saat ini terutama yang berlatar belakang Pekerja Sosial;
- b. Masih kurang optimalnya pemberian pelayanan secara prima karena pemahaman dan rasa pengabdian yang kurang;
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan Sosial yang sesuai tuntutan teknologi terkini;
- d. Belum tercapainya standar pelayanan sesuai yang telah ditetapkan;
- e. Kurangnya kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur;

- f. Belum memadai system manajemen dan pengendalian mutu;
- g. Masih terbatasnya sarana prasarana fisik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Belum memadainya pengelolaan asset
- i. Belum efektifnya system pelayanan penunjang;
- j. Belum terpenuhinya SDM yang berkualitas;

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Batam periode 2021 - 2026 maka perlu dilakukan sinkronisasi dan integrasi dengan capaian Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kepulauan Riau dengan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat agar kesesuaian capaian tersebut dapat memberikan kontribusi secara berjenjang dari Kota Batam ke Propinsi Kepulauan Riau dan selanjutnya secara nasional bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dengan Provinsi dan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan bidang Sosial, baik ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Kota Batam sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2021-2026 dengan harapan dapat menurunkan angka kemiskinan baik ditingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kota. Tujuan selanjutnya dapat mensejahterakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat pada Umumnya.

TABEL III.1 - 1
Strategi, Kebijakan Dan Program

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
1.	Meningkatkan pemberdayaan sosial melalui pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang meliputi TKSK dan PKH	Meningkatan Kemampuan Potensi TKSK dan PKH dalam pendataan dan pendampingan sosial.	Pemberdayaan Sosial
2.	Mengoptimalkan pelayanan/upaya rehabilitasi sosial thdp Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Optimalisasi rehabilitasi PPKS melalui reunifikasi keluarga, pemberian bimbingan sosial, fisik, mental, dan spirual, serta layanan kedaruratan dan rujukan bagi PMKS;	Rehabilitasi Sosial
3	Kesediaan data yang akurat tentang DTKS (Penduduk Miskin)	Pendataan dan pemberian Bantuan kepada Masyarakat yang Miskin / Pra Sejahtera	Perlindungan dan Jaminan Sosial
4	Meningkatnya pemahaman kerawanan bencana di lingkungan masyarakat dan meningkatnya	Peningkatan dan Optimalisasi SDM melalui program tanggap bencana dan meningkatnya pelayanan terhadap	Penanganan Bencana

	kewaspadaan tanggap darurat bencana	Korban Bencana	
5	Tersedianya Taman Makam Pahlawan yang Memenuhi standar	Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
6	Meningkatkan pengelolaan administrasi Kelurahan	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur kelurahan dalam pelaksanaan lomba kelurahan	Administrasi Pemerintahan Desa
7	Meningkatkan pemberdayaan kapasitas kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Meningkatkan Kapasitas kelembagaan, kader pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan dengan pemberian insentif kepada kader posyandu	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM TAHUN 2024

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial yang telah disusun untuk periode 5 (lima) tahun kedepan tahun 2021-2026 berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu sebagai berikut:

VISI

TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA

MISI

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia
4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat



Dinas Sosial berada dalam misi ke 3 (Tiga) yaitu *Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif, dan berakhlak Mulia.*

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial untuk Tahun 2021-2026 yang telah disusun seperti Tabel berikut ini :

**Tabel III.2 – 1
TUJUAN DAN SASARAN KERJA DINAS SOSIAL TA 2024**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatkan pelayanan sosial terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial / PPKS		Persentase penurunan PMKS/PPKS
	Meningkatnya rehabilitasi sosial terhadap PPKS	% PPKS yang direhab dan dientaskan
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	% PPKS yang terlindungi dengan jaminan sosial
Meningkatkan pemberdayaan/kapasitas kelembagaan masyarakat dalam berpartisipasi di pembangunan		% kelurahan aktif dan baik

	Meningkatnya kelurahan dengan administrasi pemerintahan yang baik	% kelurahan dengan administrasi pemerintahan kelurahan yang baik
	Meningkatnya kelembagaan kemasyarakatan kelurahan yang aktif	% kelurahan dengan kelembagaan masyarakat yang aktif

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS SOSIAL

Program dan kegiatan dalam rencana kerja Dinas Sosial Tahun 2024 sudah mengacu pada Permendagri 90 tahun 2019 yang telah mulai dilakukan pada awal tahun 2022 yang direncanakan berjumlah 2 (dua) Urusan, 8 (Delapan) Program Perangkat Daerah, 15 (lima belas) Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan, yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.3. Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 1.4.5. Sub Kegiatan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan
- 1.4.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.7.5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPT Nilam Suri)
- 2. Program Pemberdayaan Sosial
 - 2.1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

- 2.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2.1.3. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2.1.4. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
3. Program Rehabilitasi Sosial
- 3.1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - 3.1.2. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 3.1.3. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - 3.1.4. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
 - 3.1.5. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
 - 3.1.2. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
 - 3.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- 4.1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

5. Program Penanganan Bencana
 - 5.1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - 5.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
 - 5.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota
 - 5.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

6. Program Pengelolaan Taman makam Pahlawan
 - 6.1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - 6.1.1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - 6.1.2. Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

7. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - 7.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - 7.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - 8.1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 8.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- 8.1.5. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- 8.1.6. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

TABEL III.3.1 (TC-33)
RUMUSAN RENCANA AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2025
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			100%	18.036.220.285	APBD		100%	25.499.918.502
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Kota Batam	100%	11.639.220.285			100%	12.564.345.861
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		2 Dokumen	93.662.000			100%	88.666.500
	Pernyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	93.662.000				88.666.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	8.434.308.017			100%	9.425.911.966
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN		41 Orang	8.328.888.017				9.285.911.966
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		14 Dokumen	105.420.000				140.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	110.400.000			100%	110.000.000,00

	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan		3 Paket	110.400.000				110.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	349.697.250			100%	478.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	8.316.000				15.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	94.709.250				60.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	39.648.000				50.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	51.748.000				50.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	1.800.000				3.500.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36 Laporan	153.476.000				300.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		100%	712.887.000			100%	550.000.000

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	481.010.000				400.000.000,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan		15 Unit	93.787.000				50.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		8 Unit	138.090.000				100.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.227.004.020			100%	1.243.852.048
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	450.585.600				400.225.600,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	776.418.420				843.626.448,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		100%	711.711.998			100%	667.415.347
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2 Unit	80.960.000				86.726.346,85
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit	160.352.000				300.689.000,00

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit	84.300.000				50.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	386.099.998				130.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT Nilam Suri)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	58.299.300				100.000.000,00
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	Kota Batam	100%	2.885.922.000			100%	5.187.638.930
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang difasilitasi		100%	2.885.922.000			100%	5.187.638.930
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		98 Orang	1.522.788.000				2.733.169.250
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Lembaga	1.075.000.000				185.000.000

	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		12 Orang	173.410.000				2.102.527.590
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota		36 Sertifikat	114.724.000				166.942.090
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi;	Kota Batam	1. 90.18% 2. 90.18%	1.648.306.000			100%	3.474.504.056
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas (fisik dan mental) terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase anak terlantar yang direhabilitasi; 3. Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi; 4. Persentase tuna sosial yang direhabilitasi		1. 75% 2. 85.7% 3. 10.9% 4. 92.6%	1.648.306.000			100%	3.474.504.056
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		60 Orang	91.100.000				200.000.000,00

	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		550 Orang	636.955.950				928.209.500,00
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		550 Orang	647.061.000				1.069.259.500,00
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		15 Orang	74.867.000				141.290.780,00
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		60 Orang	91.100.000				124.230.000,00
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		80 Orang	360.095.000				476.477.526,00
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		360 Orang	352.665.000				535.036.750,00

4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT, BST)	Kota Batam	79.01%	1.118.000.000			100%	2.215.975.655
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang divalidasi dan Jumlah mahasiswa yang di bantu		100%	1.118.000.000			100%	2.215.975.655
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		27074 Orang	927.000.000				2.165.975.655,00
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		56 Orang	191.000.000				50.000.000,00
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Kota Batam	100%	511.654.000			100%	1.118.662.000
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana dari kelompok rentan yang dilindungi dan diberikan penjaminan sosial		100%	511.654.000			100%	600.000.000
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		500 Orang	511.654.000				600.000.000,00
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana	Kota Batam	89.66%	232.668.000			100%	938.792.000
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana TMP yang direhab dan dipelihara		89.66%	232.668.000			100%	938.792.000

	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		45 Makam	159.686.000				793.792.000,00
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		12 Laporan	72.982.000				145.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			100%	18.492.400.500			100%	21.758.142.100
7	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	Kota Batam	93.75%	215.249.000			100%	244.386.500
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berprestasi		12 Kelurahan	215.249.000			100%	244.386.500
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		3 Dokumen	215.249.000				244.386.500,00
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif	Kota Batam	98.44%	18.277.151.500			100%	21.513.755.600

	<p>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Persentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi</p>		<p>100%</p>	<p>18.277.151.500</p>			<p>100%</p>	<p>21.513.755.600</p>
	<p>Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</p>		<p>3 Laporan</p>	<p>140.833.000</p>				<p>430.778.000,00</p>
	<p>Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</p>		<p>1 Dokumen</p>	<p>56.111.545</p>				
	<p>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p>	<p>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</p>		<p>681 Lembaga</p>	<p>18.111.400.500</p>				<p>21.082.977.600,00</p>
Total					<p>37.223.876.035</p>				<p>47.258.060.602</p>

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2024 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

Penyusunan kegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien guna memanfaatkan dana APBD dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun menjaring aspirasi masyarakat.

Monitoring dan evaluasi juga harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan agar diperoleh hasil yang maksimal dalam mewujudkan perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Tahun 2024 adalah sebesar Rp.37.223.876.035,- yang tersebar di 8 Program 15 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan komposisi dapat dilihat pada Tabel IV-1 yang diambil dari aplikasi SIPD berikut ini:

Tabel IV-I
 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 Kota Batam Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			100%	18.036.220.285	APBD
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Kota Batam	100%	11.639.220.285	APBD
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		2 Dokumen	93.662.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	93.662.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	8.434.308.017	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN		41 Orang	8.328.888.017	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		14 Dokumen	105.420.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	110.400.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan		3 Paket	110.400.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	349.697.250	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	8.316.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	94.709.250	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	39.648.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	51.748.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		1 Dokumen	1.800.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36 Laporan	153.476.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		100%	712.887.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	481.010.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan		15 Unit	93.787.000	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		8 Unit	138.090.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.227.004.020	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	450.585.600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	776.418.420	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		100%	711.711.998	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2 Unit	80.960.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit	160.352.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit	84.300.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	386.099.998	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT Nilam Suri)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	58.299.300	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	Kota Batam	100%	2.885.922.000	APBD
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang difasilitasi		100%	2.885.922.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		98 Orang	1.522.788.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Lembaga	1.075.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		12 Orang	173.410.000	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota		36 Sertifikat	114.724.000	

3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi;	Kota Batam	1. 90.18% 2. 90.18%	1.648.306.000	APBD
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas (fisik dan mental) terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase anak terlantar yang direhabilitasi; 3. Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi; 4. Persentase tuna sosial yang direhabilitasi		1. 75% 2. 85.7% 3. 10.9% 4. 92.6%	1.648.306.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		60 Orang	91.100.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		550 Orang	636.955.950	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		550 Orang	647.061.000	

	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		15 Orang	74.867.000	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		60 Orang	91.100.000	
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		80 Orang	360.095.000	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		360 Orang	352.665.000	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT,BST)	Kota Batam	79.01%	1.118.000.000	APBD
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang divalidasi dan Jumlah mahasiswa yang di bantu		100%	1.118.000.000	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		27074 Orang	927.000.000	

	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		56 Orang	191.000.000	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Kota Batam	100%	511.654.000	APBD
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana dari kelompok rentan yang dilindungi dan diberikan penjaminan sosial		100%	511.654.000	
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		500 Orang	511.654.000	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana	Kota Batam	89.66%	232.668.000	APBD
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana TMP yang direhab dan dipelihara		89.66%	232.668.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		45 Makam	159.686.000	
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		12 Laporan	72.982.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			100%	18.492.400.500	APBD

7	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	Kota Batam	93.75%	215.249.000	APBD
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berprestasi		12 Kelurahan	215.249.000	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		3 Dokumen	215.249.000	
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	Kota Batam	98.44%	18.277.151.500	APBD
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi		100%	18.277.151.500	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		3 Laporan	140.833.000	

	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		1 Dokumen	56.111.545	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		681 Lembaga	18.111.400.500	
Total					37.223.876.035	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2024.

Rencana kerja yang dibuat merupakan rekapitulasi dan/atau rangkuman dari rencana kerja serupa yang disusun oleh Bidang, UPTD dan Sekretariat terkait dilingkungan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam yang didalam setiap Bidang, UPTD dan Sekretariat Dinas Sosial memiliki tugas menyusun program kerja Bidang, UPTD dan Sekretariat, sehingga diperoleh gambaran dan deskripsi yang berkesinambungan dan berstruktur sebagai perwujudan perencanaan partisipasif.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sebenarnya lebih banyak kegiatan yang cenderung sama dari tahun ke tahun, namun banyak juga kegiatan strategis yang tidak dapat dilaksanakan karena ketidakcukupan dana sehingga indikator program tidak dapat tercapai.

Akhir kata kami menyadari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2024 ini masih banyak ketidaksempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan dan dapat bermanfaat dalam

menunjang program kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam kedepannya.

Batam, Juli 2023
Plt. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Batam

Drs. Leo Putra, A.P, M.Si
Nip. 19750806 199501 1 001

